

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi, terjadinya pemilihan pemimpin di tiap tingkatan pemerintahan merupakan hal yang wajib, terutama sejak reformasi yang artinya demokrasi di negara kepulauan ini telah berjalan dengan berbagai dinamika yang mewarnainya. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) menurut UU Nomor 7 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu wujud sistem demokrasi Indonesia yang seharusnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun, dalam pelaksanaannya selalu terjadi kesalahan, persoalan dan pelanggaran mulai dari hal kecil hingga hal yang sangat serius yang dapat menjadi ancaman terhadap terlaksananya demokrasi yang sejati di Indonesia. Menurut John Schumpeter, Pemilihan umum adalah proses dimana warga negara memilih pemimpin politik mereka melalui suara mayoritas, yang memungkinkan adanya alternatif dalam memilih dan menentukan kebijakan publik (Aqba, 2023).

Menurut Slamet Santosa (dalam Tenri, 2024) Dinamika adalah tingkah laku yang secara langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Menurut Hendri, dinamika politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Menurut Sumarto menegaskan bahwa yang dimaksud dinamika politik adalah perilaku kolektif yang ditandai kepentingan bersama dan tujuan

jangka panjang, yaitu untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya (Tenri, 2024).

Pada saat ini dinamika politik sering terjadi, terutama pada saat menjelang pemilihan umum ataupun daerah. Dinamika ini mencakup berbagai aspek, seperti perubahan preferensi pemilih, perilaku politik masyarakat, partisipasi politik, interaksi antara aktor politik, persaingan antara berbagai elemen dalam sistem politik, serta munculnya isu-isu baru yang menjadi perhatian utama masyarakat dan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil pemilu dalam menghadapi tantangan sosial ekonomi yang kompleks. Dinamika politik menunjukkan bahwa seni dan budaya lokal sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan politik mereka. Hal ini yang mempengaruhi dan sering muncul dalam dinamika politik ialah *money politic* yang semakin ternormalisasi sebagai tatanan baku dalam dinamika politik (Nabillaazna, 2020).

Dinamika politik di Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum, sering kali diwarnai oleh berbagai gejolak dan isu yang muncul., salah satu temuan Bawaslu di Jawa Timur pada 24 maret 2023 yaitu kampanye di rumah ibadah yang dimana terdapat soal kasus bagi-bagi amplop berlogo PDI-P berisi uang Rp.300.000 di masjid di Sumenep, Jawa Timur, yang dilakukan oleh politikus PDI-P baru-baru ini. Namun, masalahnya masa kampanye baru akan dimulai resmi pada 28 November 2023 yang akan datang. Ini menunjukkan adanya pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu (Mantalean et al., 2023).

Gejolak dinamika ini hampir terjadi di seluruh Indonesia setiap kali ada pemilihan salah satunya di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau

merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang turut serta dalam kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024. Pemilu ini meliputi pemilihan badan eksekutif dan legislatif.

Tabel 1. 1 Rekap Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

sNo.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	Bintan	10	51	496	63.053	60.302	123.355
2.	Karimun	14	71	781	96.936	94.480	191.416
3.	Natuna	17	77	242	29.065	28.439	57.504
4.	Lingga	13	84	357	38.475	36.613	75.088
5.	Kepulauan Anambas	10	54	160	18.038	16.883	34.921
6.	Kota Batam	12	64	3.241	425.804	425.810	851.614
7.	Kota Tanjungpinang	4	18	637	82.164	84.912	167.076
TOTAL		80	419	5.914	753.535	747.439	1.500.974

Sumber: KPU KEPRI, 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 menyatakan bahwa data tersebut menggambarkan distribusi pemilih tetap dalam Pemilu 2024 di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam, sebagai daerah perkotaan dan pusat ekonomi, memiliki jumlah pemilih terbanyak, yang berkorelasi dengan tingkat urbanisasi dan jumlah penduduk yang padat. Di sisi lain seperti Natuna dan Anambas, menunjukkan jumlah pemilih yang lebih kecil. Batam memiliki jumlah pemilih yang besar dibandingkan dengan daerah lain di Kepulauan Riau. Jumlah pemilih yang besar ini membuat Kota Batam menjadi wilayah yang sangat strategis dan diperebutkan oleh para aktor politik. Banyaknya pemilih otomatis menarik perhatian lebih bagi para kandidat yang berlomba-lomba memaksimalkan kampanye mereka. Persaingan di Batam lebih

ketat karena setiap kandidat harus berusaha keras untuk meraih dukungan yang signifikan dari masyarakat yang sangat heterogen. Berdasarkan data yang menunjukkan jumlah pemilih yang signifikan di Batam, dinamika politik di kota ini cenderung lebih bergejolak dibandingkan di kota/ kabupaten lain.

Tabel 1. 2 Laporan Rekap Data Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

No	Lokasi	Tanggal	Dugaan Pelanggaran	Status	Jenis
1	Kecamatan Sekupang	18 Desember 2023	Kampanye di tempat ibadah	Ditindak lanjuti ke kepolisian dan pengadilan	Temuan Panwaslu Kecamatan
2	Kecamatan Batam Kota	24 Januari 2024	Dugaan, pemberian izin pemakaian landmark Welcome to Batam untuk pemasangan spanduk pada masa kampanye	Dihentikan	Temuan Bawaslu Kota Batam
3	Kecamatan Bengkong	14 Februari 2024	Dugaan politik uang pada masa tenang	Dihentikan	Pelaporan
4	Kecamatan Sekupang dan Belakang Padang	16 Februari 2024	Penggelembungan suara pada saat pungut hitung	Dihentikan	Pelaporan
5	Kecamatan Nongsa	1 Maret 2024	Penggelembungan suara pada saat pungut hitung	Dihentikan	Pelaporan
6	Kecamatan Sungai Beduk	8 Maret 2024	Politik uang pada masa tenang	Dihentikan	Pelaporan

Sumber: Bawaslu Kota Batam (Telah diolah kembali), 2024.

Dari data yang disajikan pada Tabel 1.2 data pelanggaran pemilu 2024 di Kota Batam menunjukkan sejumlah kasus yang signifikan dalam beberapa kategori, termasuk praktik politik uang, manipulasi suara, dan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan yang semakin marak. Pelanggaran selama kampanye yang melibatkan penggunaan fasilitas publik yang seharusnya netral, seperti tempat ibadah dan *landmark* menunjukkan bahwa ada aktor politik yang mencoba

memanfaatkan tempat strategis untuk mendapatkan keuntungan politik. Pada masa tenang seharusnya digunakan untuk refleksi dan tidak ada aktivitas politik. Namun, data menunjukkan politik uang masih berlangsung, yang dapat mengarah pada upaya untuk mempengaruhi pilihan pemilih atau suara menjelang pemungutan serta pada tahap penghitungan merupakan tahap yang sangat penting karena terkait langsung dengan hasil pemilu. Laporan penggelembungan suara di beberapa kecamatan menunjukkan adanya upaya untuk memanipulasi hasil secara langsung. Batam memiliki potensi dinamika perilaku politik yang lebih kompleks dan berpotensi konflik.

Dinamika perilaku politik sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan teknologi informasi. Menurut penelitian Putra & Adila, (2020) pengaruh dari faktor sosial ialah adanya kesamaan suku atau sering disebut dengan ikatan paguyuban. Pengaruh dari ikatan paguyuban ini menciptakan kecenderungan pemilih untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang berasal dari suku, agama, atau komunitas yang sama. Hal ini sering kali didasari oleh rasa solidaritas dan kepercayaan terhadap kandidat yang dianggap lebih memahami kebutuhan kelompok tersebut. Menurut (Hendika, 2022) dilihat dari segi ekonomi, dinamika perilaku politik dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang ekonominya menengah kebawah cenderung lebih rentan terhadap praktik politik uang, seperti serangan fajar yang diberikan oleh para elit politik karena berakar pada ketimpangan ekonomi. Menurut Akbar et al. (2024) dengan kemajuan teknologi informasi, informasi dapat dengan cepat dan mudah disebarkan melalui berbagai *platform* media sosial. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk

terlibat secara lebih aktif dalam proses politik dan pemilihan. Namun, di sisi lain media sosial juga membawa risiko adanya *hoax* yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih.

Perilaku politik pemilih menjadi salah satu aspek penting yang menentukan kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu. Perilaku politik tidak bersifat statis, melainkan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, informasi media, hingga citra calon legislatif yang bersaing. Pada Pemilu Serentak 2024, dinamika perilaku politik masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya fenomena seperti maraknya praktik politik uang (*money politic*), serta bergesernya orientasi pemilih ke arah pragmatisme politik. Pemilih tidak lagi semata-mata memilih berdasarkan loyalitas partai atau ikatan emosional, tetapi lebih rasional dengan mempertimbangkan keuntungan pribadi dan kebutuhan praktis sehari-hari. Kondisi ini semakin kompleks di daerah-daerah yang memiliki latar belakang sosial yang beragam.

Menurut Dailami et al. (2022) Kota Batam merupakan kota yang masyarakatnya heterogen dan multikultural. Hal ini dibuktikan dengan adanya suku bangsa, adat istiadat, kehidupan sosial ekonomi dan agama masyarakat Kota Batam yang berbeda-beda. Keberagaman ini dapat terbentuk karena masyarakat di Kota Batam didominasi oleh pendatang yang berasal dari seluruh Indonesia. Heterogenitas masyarakat Batam dapat menjadi sebuah tantangan sehingga dapat mempengaruhi dinamika politik yang unik dan kompleks, termasuk dalam hal preferensi politik, partisipasi pemilih, strategi kampanye, perilaku politik dan hasil

pemilu. Setiap kelompok etnis dan budaya mungkin memiliki aspirasi politik yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti identitas, kepentingan ekonomi, dan nilai-nilai sosial (Giyandri & Sinaga, 2024) .

Menurut Maliki (2018) Dinamika politik lebih cenderung marak di kabupaten dan di kota yang masyarakatnya lebih heterogen dibanding dengan homogen. Masyarakat homogen merupakan masyarakat yang memiliki kesamaan dalam hal etnis, agama dan budaya biasanya menunjukkan keseragaman dalam perilaku politik mereka. Keputusan politik pada masyarakat homogen cenderung lebih mudah diprediksi karena adanya konsensus yang lebih kuat dalam nilai-nilai yang dianut.

Gejolak dinamika politik pada pemilu seperti *money politic* sering terjadi pada saat menjelang pemilu. Menurut (Kurniawan et al., 2023) *Money politic* digunakan pada suatu keadaan yang mana uang, sembako, dan bantuan lainnya dipakai untuk membayar sesuatu yang pada dasarnya sesuatu tersebut tidak bisa dibeli dengan uang atau materi. Hal ini tentu saja sangat mengganggu demokrasi dan merugikan hak suara masyarakat yang seharusnya bebas untuk memilih tanpa adanya tekanan finansial. Selain *money politic*, *Black Campaign* juga dapat terjadi pada proses menjelang pemilu dengan tujuan memanipulasi proses politik demi keuntungan pihak tertentu dengan cara yang tidak etis.

Menurut penelitian Harahap (2020) *Black campaign* sering terjadi karena penggunaan media sosial yang semakin meluas. Media sosial memberikan *platform* yang mudah dan cepat bagi siapa saja untuk menyebarkan informasi, termasuk berita bohong atau manipulatif, tanpa adanya kontrol yang ketat. Serta pada saat

proses pemilu berlangsung pun seringkali terjadi kecurangan dalam perhitungan suara, adanya identitas palsu dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas di TPS pada Pemilu. Hal ini bisa membuat suara tidak sah dan merugikan kandidat yang seharusnya mendapatkan suara tersebut (Maarif & Arifin, 2024). Fenomena gejala politik tersebut dapat merusak demokrasi dan tantangan yang berpotensi merusak legitimasi politik. Dengan persaingan yang begitu ketat, kemungkinan terjadi pelanggaran pemilu seperti politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi suara yang menjadi bagian dari dinamika gejala politik di Batam, yang tidak hanya berkisar pada kompetisi yang sehat, tetapi juga potensi konflik. Konsekuensi dari dinamika politik sangat luas dan kompleks. Di tingkat individu, praktik ini dapat melanggengkan budaya transaksional dalam demokrasi.

Tabel 1. 3. Rekap Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah TPS
1.	Belakang Padang	15,310	74
2.	Bulang	8. 358	37
3.	Galang	13.830	62
4.	Sungai Beduk	66.580	238
5.	Sagulung	144.451	568
6	Nongsa	62.654	231
7	Batam Kota	133.259	528
8	Sekupang	144.029	413
9	Batu Aji	94.975	332
10	Lubuk Baja	65.924	257
11	Batu Ampar	44.491	175
12	Bengkong	87.753	326
Kota Batam		851.614	3.241

Sumber: KPU Kota Batam, (Telah diolah kembali), 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 Kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak adalah kecamatan Sagulung dengan 144.451 pemilih dan 568 TPS. Ini menunjukkan bahwa Sagulung memiliki populasi pemilih yang cukup besar dibandingkan kecamatan lainnya yang memungkinkan dinamika politiknya lebih menonjol atau bergejolak daripada daerah atau kecamatan lain. Daerah dengan jumlah pemilih yang padat biasanya menjadi fokus utama para kandidat karena memiliki potensi suara yang tinggi. Hal ini mendorong persaingan yang lebih ketat, bahkan cenderung berisiko munculnya praktik-praktik seperti politik uang atau kampanye negatif.

Berdasarkan BPS Kota Batam, 2024 kondisi sosial ekonomi masyarakat Sagulung yang sebagian besar bekerja di sektor informal dan industri yang memiliki tingkat pendapatan yang bervariasi. Hal ini dapat membuat masyarakat di sana rentan terhadap politik uang. Hal ini didukung oleh akses yang relatif mudah bagi kandidat untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan banyaknya penduduk di kecamatan sagulung menciptakan basis suara yang besar, sehingga kandidat lebih tertarik melakukan kampanye dan politik uang di lokasi tersebut. Dibanding dengan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat Batuaji yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor industri dengan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan cenderung masyarakatnya homogen dan Batam Kota, Sekupang, Nongsa memiliki kondisi ekonomi yang cukup stabil. karena mayoritasnya bekerja pada sektor profesional, pariwisata dan pengusaha. Lubuk Baja dan Bengkong dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi dan masyarakat di sini juga banyak yang terlibat di sektor pariwisata dan perdagangan yang ekonominya relatif stabil.

Berdasarkan letak geografisnya, Sagulung dan Batu aji merupakan kecamatan yang letaknya strategis dan berdekatan dengan kawasan industri besar di Batam, sehingga dapat memudahkan mobilisasi masyarakat. Banyak penduduk dari luar Batam yang datang untuk tinggal di daerah sagulung dan batuaji dan mencari pekerjaan di sektor industri, sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk yang signifikan. Dibandingkan dengan daerah Belakang Padang, Bulang, dan Galang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dengan kondisi geografis dan keterpencilan daerah mengurangi daya tarik bagi para kandidat untuk berkampanye secara masif. Faktor jarak dan aksesibilitas di beberapa kecamatan membuat upaya kampanye yang memerlukan mobilisasi sumber daya dan infrastruktur menjadi lebih mahal dan sulit dijangkau. Dengan demikian, kampanye di daerah-daerah ini dianggap tidak strategis dan kurang potensial dalam hal pengumpulan suara, dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar dan akses yang lebih mudah.

Selain dari kondisi geografis dan sosial ekonominya, Kecamatan Sagulung juga turut memainkan peran penting dalam gejolak dinamika politiknya daripada daerah lain, Menurut pemberitaan dari TribunBatam.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 036 yang berada di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, pada hari Minggu, 18 Februari 2024. Pemungutan Suara Ulang ini dilaksanakan diduga akibat kelalaian dari petugas KPPS, dimana dua surat suara digunakan oleh individu yang berbeda pada Pemilu tanggal 14 Februari

2024. Kejadian ini mencerminkan adanya dinamika politik yang berlangsung di wilayah Kecamatan Sagulung.

Pada Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Sagulung juga pernah terjadi persoalan terkait kampanye politik. Diantara nya berita di dapat dari laporan Bawaslu terkait data penanganan pelanggaran Pemilu 2019 Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam (Batam, 2019) dan media online Batamtoday.Com (Pamungkas, 2019) di mana beberapa kasus pelanggaran kampanye terjadi, seperti pada Terdakwa (HH) yang merupakan calon anggota DPRD Kepulauan Riau dengan Nomor Urut 1 Partai Demokrat dapil 5. Ia tersandung kasus tindak pidana karena diduga melakukan kegiatan kampanye terselubung di Gereja HKBP Sei Langkai, Sagulung pada tanggal 16 bulan januari tahun 2019. Hal tersebut merupakan permasalahan politik yang terjadi di Kecamatan Sagulung pada Pemilu tahun 2019.

Meski jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya cukup tinggi, masih ditemukan perilaku politik masyarakat yang belum dewasa secara demokratis. Sebagian warga memilih calon karena diberi uang atau imbalan, bukan karena mengenal visi, program, atau kualitas calon tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih melihat politik secara praktis, bukan sebagai bentuk partisipasi yang sadar dan bertanggung jawab. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan rendahnya pengetahuan tentang politik.

Dinamika perilaku politik pada pemilu Kota Batam menarik untuk dikaji karena Kota Batam dikenal sebagai kota dengan masyarakat yang sangat heterogen. Keberagaman ini menciptakan dinamika perilaku politik yang kompleks dan Kota ini juga merupakan pusat industri dan perdagangan yang strategis, migrasi masuk

yang tinggi, persoalan politik yang cenderung lebih menonjol sehingga dapat mempengaruhi dinamika perilaku politik pada pemilu di Kota Batam pada periode 2024.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Kecamatan Sagulung pada tahun 2023 pekerjaan sektor informal di Sagulung cenderung memberikan penghasilan yang tidak stabil, hal ini bisa memperburuk tingkat kemiskinan dan meningkatkan resiko keluarga dipengaruhi oleh tawaran politik uang yang muncul dalam proses pemilihan. Faktor seperti pendapatan yang rendah dan ketergantungan pada pekerjaan informal membuat banyak keluarga di daerah ini lebih rentan terhadap godaan praktik politik uang di masa pemilu. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, tawaran uang dari calon dapat menjadi daya tarik yang sulit ditolak, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan mengingat berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Batam, masih menghadapi permasalahan serupa dalam pelaksanaan Pemilu, seperti politik uang, serangan fajar, dan pengaruh *elite* ekonomi dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Fenomena ini mencerminkan dinamika perilaku politik masyarakat lokal yang kompleks serta menunjukkan ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana kelompok ekonomi menengah ke bawah lebih rentan terhadap politik transaksional. Karakteristik sosial ekonomi Batam menjadikannya layak untuk dikaji secara khusus.

Batam merupakan kota industri dan kawasan perdagangan bebas yang didominasi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah, menjadikannya kota yang

sangat heterogen secara sosial dan budaya. Kondisi ini menciptakan dinamika politik yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain yang lebih homogen. Heterogenitas masyarakat Batam mencerminkan keberagaman yang tinggi, menjadikannya studi kasus yang menarik dalam memahami perilaku politik masyarakat. Meskipun ada sejumlah penelitian yang membahas tentang pemilu di Kota Batam. Namun, penelitian yang fokus pada dinamika perilaku politik masyarakat di kota dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, seperti Batam, masih terbatas.

Kota Batam dengan keragaman etnis, agama, dan budaya yang besar menghadirkan kompleksitas dalam analisis perilaku politik yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Sebagian besar penelitian tentang pemilu di Batam umumnya berfokus pada wilayah pusat kota yang lebih dikenal dan padat, sementara Kecamatan Sagulung, yang lebih berkembang secara sub urban dan memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda, masih kurang diteliti. Masyarakat di Kecamatan Sagulung, yang terdiri dari penduduk asli dan migran dari berbagai daerah, memiliki pola perilaku politik yang unik, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya dan belum ada penelitian yang mendalam mengenai bagaimana perilaku politik yang berkembang di Kecamatan Sagulung. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana dinamika perilaku politik masyarakat Kecamatan Sagulung, Kota Batam terbentuk dan dipengaruhi oleh berbagai aspek-aspek yang khas. Penelitian ini bukan hanya menambah khasanah kajian tentang perilaku politik di Indonesia, tetapi juga berkontribusi dalam

memahami bagaimana demokrasi bekerja (atau gagal bekerja) dalam konteks kota industri yang kompleks dan majemuk seperti Batam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Dinamika Perilaku Politik Masyarakat Sagulung Pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Batam?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika perilaku politik masyarakat sagulung pada pemilu tahun 2024 di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang berkaitan dengan dinamika perilaku politik dan Pemilu, menjadi dasar analisis untuk memahami tantangan-tantangan demokrasi dalam konteks lokal, khususnya di wilayah dengan masyarakat yang heterogen seperti Batam serta menambah wawasan tentang

bagaimana dinamika perilaku politik masyarakat sagulung pada Pemilu periode 2024 di Kota Batam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu, Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang sering terjadi selama pemilu, seperti politik uang dan kampanye yang tidak sesuai aturan. Informasi ini dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.
2. Bagi Masyarakat, Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dan perilaku politik yang berkualitas, sekaligus membantu masyarakat memahami dampak negatif dari praktik-praktik seperti politik uang dan kampanye hitam.